

PENYALURAN BANTUAN LOGISTIK OLEH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PADA KORBAN BANJIR DI KOTA MAKASSAR

Siti Nathasya Dwi Oktavia I

NPP. 30.1255

Asdaf Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan

Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik

Email : 30.1225@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi : Sri Heryati, SH, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): One of the most frequent disasters in Makassar City is the flood disaster. Based on the data and information obtained, there are 6 (six) sub-districts which are the most frequent locations and are prone to flooding, namely Tamalanrea District, Panakukang District, Rappocini District, Manggala District, Bringkanaya District, and Tamalate District. One of the main elements of a disaster management activity is disaster logistics assistance. Logistical Assistance is a series of actions involving the procurement, storage and distribution of products according to the type, quantity, time and location desired or required to meet the basic needs of human life. There are several problems in flood disaster management in Makassar City, it seems that the limited Human Resources (HR) and transportation facilities have resulted in the slow distribution of aid to victims affected by the disaster. Logistical assistance is very much needed in disaster management, especially when a disaster occurs. Therefore the author takes the title of the thesis on "Distribution of Logistical Assistance by the Regional Disaster Management Agency for Flood Victims in Makassar City". **Purpose:** This study intends to obtain a description of how logistics assistance is distributed in Makassar City. Then find out what are the supporting and inhibiting factors as well as the efforts made in carrying out logistical assistance. **Method:** This study uses a qualitative descriptive design with an inductive approach. The theory used is Duncan's Theory of Effectiveness. Data collection techniques carried out by observation, interviews, and documentation. **Result:** Makassar City Government's policy regarding natural disaster logistical assistance as stipulated in Makassar City Regional Regulation Number 04 of 2009 can in fact make a significant contribution to victims affected by natural disasters, both those who experience floods and other disasters. The Regional Disaster Management Agency (BPBD) in distributing logistical assistance still has several obstacles such as limited budgets owned by BPBD which makes the distribution of logistical assistance to the community itself limited, and BPBD is still not optimal in coordinating with related agencies. **Conclusion:** The Regional Disaster Management Agency (BPBD) in distributing logistical assistance to flood victims in Makassar City is still not optimal. The effectiveness of implementing logistical assistance distribution is not optimal, because practically it is still faced with several problems, one of which is limited human resources and logistics distribution facilities, so that the distribution of aid experiences delays.

Keywords: Logistical Assistance, Flood Disaster, Emergency Response

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Salah satu bencana yang paling sering terjadi di Kota Makassar adalah bencana banjir. Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh, terdapat 6 (enam) kecamatan yang merupakan lokasi paling sering dan rawan terjadinya banjir yaitu Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Panakukang, Kecamatan Rappocini, Kecamatan Manggala, Kecamatan Bringkanaya, dan Kecamatan Tamalate. Salah satu unsur utama suatu aktivitas penanggulangan bencana adalah bantuan logistik bencana. Bantuan Logistik merupakan serangkaian tindakan yang melibatkan pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian produk sesuai dengan jenis, jumlah, waktu, dan lokasi yang diinginkan atau diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia. Terdapat beberapa permasalahan dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Makassar seperti terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan fasilitas sarana transportasi yang mengakibatkan lambannya pendistribusian bantuan kepada korban terdampak bencana. Bantuan Logistik sangat diperlukan dalam penanggulangan bencana khususnya pada saat terjadi bencana. Oleh karena itu penulis mengambil judul Skripsi tentang “Penyaluran Bantuan Logistik oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada Korban Banjir di Kota Makassar”. **Tujuan:** penelitian ini bermaksud untuk memperoleh deskripsi mengenai bagaimana penyaluran bantuan logistik di Kota Makassar. Kemudian mengetahui apa yang menjadi faktor-faktor baik pendukung dan penghambat serta upaya yang dilakukan dalam melaksanakan bantuan logistik. **Metode:** Penelitian ini menggunakan desain Deskriptif Kualitatif dengan pendekatan Induktif. Teori yang digunakan ialah Teori Efektivitas dari Duncan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Kebijakan Pemerintahan Kota Makassar mengenai bantuan logistik bencana alam sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 04 Tahun 2009 secara faktual dapat memberikan kontribusi yang berarti kepada korban yang terkena bencana alam, baik yang mengalami bencana banjir maupun bencana lainnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menyalurkan bantuan logistik masih mempunyai beberapa hambatan seperti keterbatasan anggaran yang dimiliki BPBD yang membuat penyaluran bantuan logistik kepada masyarakat sendiri menjadi terbatas, dan BPBD masih kurang optimal dalam berkoordinasi dengan Dinas terkait. **Kesimpulan:** Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penyaluran bantuan logistik terhadap korban bencana banjir di Kota Makassar masih belum optimal. Efektivitas penyaluran bantuan logistik secara implementatif kurang optimal, karena secara aplikatif masih dihadapkan pada beberapa permasalahan, salah satunya keterbatasan sumber daya manusia dan sarana penyaluran logistik, sehingga penyaluran bantuan mengalami keterlambatan.

Kata kunci: Bantuan Logistik, Bencana Banjir, Tanggap Darurat

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terjadinya bencana banjir di Indonesia umumnya disebabkan oleh kerusakan lingkungan, terutama tingginya intensitas curah hujan serta daya dukung daerah aliran sungai yang menurun. Akibat rendahnya daya dukung aliran sungai, sehingga membuat lahan di daerah tersebut tidak mampu menahan laju aliran air dan tidak diimbangi dengan perbaikan kondisi lingkungan. Perilaku masyarakat juga menjadi salah satu faktor pemicu yang memperparah terjadinya banjir seperti beberapa penduduk tidak bertanggungjawab dimana sembarangan membuang sampahnya di sungai. Dengan keadaan bencana alam yang kerap timbul di Indonesia, maka Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang bertujuan supaya pelaksanaan Penanggulangan bencana dapat dioptimalkan lebih baik dari unsur Pemerintahan maupun penduduk. Pemerintah daerah serta pusat mempunyai peran penting atas pertanggung jawaban

penanggulangan bencana yang dilaksanakan secara terarah dan terencana, dimulai dari perencanaan prabencana dan diakhiri dengan pemulihan bencana.

Dalam upaya penanggulangan bencana, diperlukannya juga sistem manajemen logistik penanggulangan bencana yang bertujuan untuk mendistribusikan bantuan secara lebih baik dan efisien. Pengelolaan manajemen logistik secara efisien serta efektif menjadi parameter yang esensial dalam menyalurkan bantuan kepada korban bencana alam. Hal ini diatur dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana, yang menyebutkan dalam menentukan manajemen logistik penanggulangan bencana harus mencakup tahapan perencanaan kebutuhan manusia, perencanaan penyaluran bantuan, pengadaan, penerima bantuan kemanusiaan, penyimpanan, peralatan penanggulangan bencana serta pertanggung jawaban.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan penyaluran bantuan logistik oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada korban bencana banjir di Kota Makassar. Sejumlah wilayah di Kota Makassar selalu terdampak oleh banjir hampir di setiap tahunnya. Secara umum banjir ini berlangsung pada Desember-Februari, yakni ketika terjadi curah hujan tertinggi. Sejumlah banjir terbesar yang sebelumnya terjadi diantaranya yakni di tahun 1967, 1976, 1983, 1996, serta 2013, dimana banjir dan genangan yang terjadi lebih tinggi dan lebih luas dari biasanya, termasuk banjir di bulan Januari 2019 lalu.

Tabel 1. 1
Jumlah Data Korban Bencana Banjir

No	Tahun Kejadian	Jenis Bencana	Total Bencana	Meninggal (jiwa)	Terluka (jiwa)	Menderita (jiwa)	Mengungsi (jiwa)
1	2019	Banjir	814	263	1.088	1.679.802	121.349
2	2020	Banjir	1.531	132	64	3.483.714	781.054
3	2021	Banjir	1.182	392	1.424	4.274.397	406.692
4	2022	Banjir	594	8	10	83.613	9.462

Sumber: *Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI)*

Dari tabel data jumlah korban tersebut bencana banjir menyebabkan masyarakat banyak yang mengalami menderita, hilang, terluka hingga meninggal serta banyaknya kerusakan yang terjadi seperti kerusakan rumah dan seisinya ataupun sarana prasarana umum lainnya.

Tabel 1. 2
Data Penyaluran Logistik Bencana Banjir

NO	Kecamatan	Jenis Bencana	Jumlah Pos	Jumlah paket dan Jenis bantuan						
				Terpal	Selimut	Baju	First Aid Kit	Sarung	Family Kit	Baby Kit
1	Bringkanaya	Banjir	9	4	112	-	109	286	113	57
2	Manggala	Banjir	6	3	100	-	76	181	100	45
3	Tamalanrea	Banjir	1	-	1	-	4	12	10	6
4	Panakukang	Banjir	3	6	30	15	36	61	36	30

Sumber Data : BPBD Kota Makassar Tahun 2022

Tabel tersebut menunjukkan terdapat 4 kecamatan dengan jumlah pos dan jumlah paket serta bantuan yang masing-masing berbeda sesuai kapasitas yang disediakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar di masing-masing wilayah.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian dari Rizal Wayudha yang berjudul “Implementasi Penanggulangan Bencana Banjir Oleh BPBD Provinsi DKI Jakarta”, menjelaskan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta melakukan tahapan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Pada tahapan pra bencana banjir BPBD Provinsi DKI Jakarta melakukan tahapan kesiagaan, peringatan dini, dan mitigasi. Saat bencana terjadi BPBD Provinsi DKI Jakarta melakukan tahapan tanggap darurat dan penanggulangan bencana. BPBD Provinsi DKI Jakarta juga melakukan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi pada saat pasca bencana banjir. Penelitian tersebut mempergunakan metode deskriptif kualitatif.

Penelitian dari Muhammad Lukmanul Hakim yang berjudul “Peran Dinas Sosial Penyaluran Bantuan Sosial Terhadap Korban Bencana Kebakaran di Kota Samarinda” menjelaskan bahwa Dinas Sosial di Kota Samarinda telah melaksanakan fungsi maupun tugasnya untuk mendukung walikota dalam menyelenggarakan keperluan pemerintahan konkuren dibidang social tetapi masih dianggap lemah dalam hal penyaluran bantuan social serta perlu diperhatikan khususnya pihak terkait. Penyaluran bantuan sosial ini diharap mampu mendukung keberlangsungan hidup dari korban, dimana meliputi, pakaian, makanan, serta lainnya. Perbedaan yang diperoleh yakni penelitian ini membahas Peranan dari Dinas Sosial untuk menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat korban kebakaran, serta dilaksanakannya di Kota Samarinda. Penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Penelitian dari Dian Kusuma Wardani yang berjudul “Efektivitas Manajemen Operasional Pimpinan Dalam Pengelolaan Logistik dan Peralatan Di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Utara”, menjelaskan bahwa BPBD telah mengupayakan dalam mengelola logistik dan peralatan, tetapi masih mendapati sejumlah permasalahan yang diakibatkan oleh sejumlah

indikator dari manajemen logistik serta terbatasnya peralatan bencana. Indikator pergudangan di BPBD Sumatera Utara kecil dan kurang ventilasi udara, dimana pada penyelenggaraannya hanya mengoptimalkan kendaraan yang tersedia. Perbedaan yang ditemui yakni penelitian ini membahas keefektifan BPBD dalam mengupayakan manajemen logistik dan peralatan bencana yang memadai. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian tersebut mempergunakan metode deskriptif kualitatif.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, pada penelitian yang dilakukan oleh Rizal Wayudha yang berjudul “Implementasi Penanggulangan Bencana Banjir Oleh BPBD Provinsi DKI Jakarta”, dalam penelitiannya menggunakan teori implementasi yang jelas berbeda dengan teori yang digunakan oleh peneliti yaitu teori efektivitas menurut Duncan dalam Steers. Sehingga pembahasannya juga sudah pasti berbeda.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Lukmanul Hakim yang berjudul “Peran Dinas Sosial Penyaluran Bantuan Sosial Terhadap Korban Bencana Kebakaran di Kota Samarinda”, dalam penelitian tersebut menggunakan teori Peran dan fokus pembahasannya pada korban bencana kebakaran dengan lokus penelitian di Kota Samarinda.

Penelitian yang dilakukan oleh Dian Kusuma Wardani yang berjudul “Efektivitas Manajemen Operasional Pimpinan Dalam Pengelolaan Logistik dan Peralatan Di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Utara”, lebih fokus membahas terkait pengelolaan logistik dan peralatan dengan lokus penelitian pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Utara.

1.5. Tujuan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan dengan penyaluran bantuan logistik oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada korban bencana banjir di Kota Makassar, faktor penghambat dan pendukung serta upaya untuk mengatasinya.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, hal ini karena peneliti ingin menjelaskan bagaimana kondisi sebenarnya yang terjadi saat penelitian berlangsung sesuai dengan pengertian penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan dengan mengumpulkan data lalu menjelaskannya ke dalam analisis dan perumusan masalah yang ditemukan saat di lapangan nantinya. Menurut Moleong (2004:6), penelitian kualitatif deskriptif yakni penelitian untuk mempelajari fenomena-fenomena yang responden alami dengan holistik, melalui penggambaran dalam kalimat, misalnya persepsi, perilaku, tindakan, motivasi, serta lainnya, kata-kata dan Bahasa, dalam lingkungan yang unik serta alami, serta menggunakan berbagai pendekatan alamiah.

Nazir (2013:54) memberikan pernyataannya bahwasanya: Metode deskriptif ditujukan untuk mempelajari status kelompok individu, sebuah keadaan, sebuah objek, sebuah sistem pemikiran, maupun sebuah kelas, ataupun fenomena di masa terkini. Penelitian deskriptif sendiri ditujukan untuk membentuk gambaran maupun deskripsi secara akurat, faktual, serta sistematis terkait sifat, fakta, maupun hubungan diantara peristiwa fenomena yang peneliti selidiki.

Melalui metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, peneliti berharap mampu menggambarkan deskripsi secara mendalam berdasarkan fakta dan data-data yang ditemui langsung di lapangan hingga memperoleh kesimpulan dari permasalahan tentang penyaluran bantuan logistik oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada korban *bencana* banjir di Kota Makassar, termasuk masalah yang dihadapi dalam pelaksanaannya serta upaya mengatasinya. Teknik pengumpulan data

dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini informan ditentukan melalui teknik *purposive dan snowball sampling*. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang dianalisis menggunakan teori efektivitas dari Duncan dalam Maulana Mufis (2016) yang terdiri dari 3 (tiga) dimensi yaitu: pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai institusi/lembaga yang diberikan mandat untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah bertugas untuk melaksanakan, memfasilitasi kegiatan manajemen dan mengkoordinasikan kepada para pihak. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan salah satu instansi yang melakukan penanganan bencana di daerah salah satunya di Kota Makassar dalam penanganan bencana banjir.

3.1 Penyaluran Bantuan Logistik Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pada Korban Bencana Banjir Di Kota Makassar

3.1.1 Dimensi Pencapaian Tujuan Pada Penyaluran Bantuan Logistik di Kota Makassar

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti selama berada di lapangan dan mengacu pada teori Efektivitas Duncan (Maulana Mufis, Mughron 2016) penulis menentukan indikator dari dimensi Pencapaian Tujuan yaitu tercapainya target dan sasaran terhadap korban penerima bantuan logistik dan ketepatan waktu dalam penyaluran bantuan logistik di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar

a. Target dan Sasaran Bantuan Logistik

Program yang telah dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam hal penanganan kepada korban bencana banjir adalah memberikan bantuan logistik sebagai berikut :

1. Kebutuhan Pokok yaitu berupa : beras, sarden, mie instan, telur, kecap manis, pakaian, obat-obatan, kebutuhan ibu hamil dan menyusui, kit ware dan family kid
2. Memberikan penyuluhan bantuan berupa tempat tinggal yang akan ditempati para korban bencana banjir untuk mengungsi dan meringankan beban.

b. Ketepatan Waktu Dalam Menyalurkan Bantuan Logistik

Mengenai penyaluran bantuan logistik bencana alam, terutama yang terkena musibah bencana banjir dan tanah longsor selalu diberikan meski demikian kurang tepat waktu. Karena diberikan setelah berselang beberapa waktu terjadinya musibah banjir atau tanah longsor, maka bantuan tersebut barulah diterima. Penyaluran bantuan bencana alam tidak serta merta, tetapi selalu mengacu pada mekanisme yang ada, karena sistem yang mengatur penyaluran bantuan tersebut sudah baku maka semua bantuan yang disalurkan kepada korban harus mengikuti prosedur atau mekanisme yang berlaku.

Hal tersebut disebabkan oleh jalur birokrasi yang memang tidak bisa dipangkas dan semua itu diatur sesuai ketentuan yang berlaku, dan disamping itu perlu proses administrasi yang telah ditentukan berdasarkan mekanisme yang ada, sehingga cukup beralasan jika penyaluran bantuan kurang tepat waktu.

3.1.2 Dimensi Adaptasi Pada Penyaluran Bantuan Logistik di Kota Makassar

Adaptasi merupakan kemampuan untuk dapat menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya. Pada indikator ini peneliti mengambil adaptasi untuk mengetahui kemampuan Badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar dalam penyaluran bantuan logistik kepada korban bencana banjir yang setiap tahunnya selalu terjadi di Kota Makassar.

a. Sumber Daya Manusia

Keberadaan sumber daya aparatur yang bertindak sebagai tim pelaksana yang menyalurkan bantuan untuk korban bencana alam ditinjau dari segi kualitas maupun kuantitas termasuk cukup memadai. Mengingat Kota Makassar mengalami peningkatan banjir dari tahun ketahun. Misalnya pada tahun 2019 terdapat , tahun 2020 juga terjadi nhde kasus. Dengan mempertimbangkan banyaknya kasus banjir maka dalam rangka mengetahui seberapa efektif penyaluran bantuan penambahan anggota tim pelaksana. Terutama dalam menghadapi kejadian yang sifatnya tanggap darurat, maka diperlukan anggota tim yang lebih banyak, sehingga untuk sementara waktu para korban akan mendapat pertolongan secepatnya.

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana Badan penanggulangan Bencana Daerah KotaTanjungpinang cukup memadai dalam melaksanakan penanggulangan bencana. Namun diperlukannya pula penambahan fasilitas demi mendukung kinerja dan kelancaran dalam melaksanakan tugasnya. Terdapat berbagai jenis bantuan dan logistik yang diberikan kepada masyarakat korban bencana banjir Kota Makassar. Jenis dan bantuan logistik yang disalurkan kepada masyarakat terdampak bencana dapat diklafikasi ke dalam kelompok sandang, pangan, dan papan.

Tabel 1.1
Rekapitulasi Berita Acara Penyaluran/Penyerahan
Barang Bantuan Logistik (Barang Stimulan) Tahun 2022

NO	NAMA BARANG	SATUAN	JUMLAH BARANG	KETERANGAN
1	TENDA DARURAT / TERPAL	Lembar	278	Pengadaan Barang BPBD Kota Makassar
2	Selimut	Lembar	903	Pengadaan Barang BPBD Kota Makassar
3	Sarung	Lembar	890	Pengadaan Barang BPBD Kota Makassar
4	Baju Kaos	Lembar	182	Pengadaan Barang BPBD Kota Makassar
5	First Aid Kit	Lembar	437	Pengadaan Barang BPBD Kota Makassar
6	Family Kit	Lembar	474	Pengadaan Barang BPBD Kota Makassar
7	Baby Kit	Lembar	286	Pengadaan Barang BPBD Kota Makassar

Sumber: BPBD Kota Makassar 2022

Logistik dan bantuan untuk masyarakat korban bencana banjir secara resmi diperoleh dari pihak pemerintah. Terdapat beberapa barang rekapitulasi penyaluran barang bantuan logistik yang diadakan langsung dari BPBD Kota Makassar.

c. Kemampuan Anggaran

Anggaran yang digunakan BPBD Kota Makassar sendiri diperoleh dari pusat yaitu APBN jadi untuk masalah anggaran dalam penyaluran bantuan logistik kepada korban banjir tercukupi sesuai jumlah korban yang terdampak bencana.

d. Strategi

Untuk kesuksesan suatu proses maka perlu adanya suatu konsep perencanaan strategis dan perencanaan yang jelas. BPBD Kota Makassar menyusun perencanaan dalam pengelolaan bencana untuk mencapai penanganan bencana banjir yang dapat melindungi korban yang terdampak. Pada saat kejadian awal bencana yang diperoleh, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar menugaskan Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk melaksanakan tugas pengkajian bencana ditempat kejadian. Hasil pelaksanaan tugas TRC tanggap darurat bencana banjir dijadikan bahan pertimbangan bagi Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar untuk mengusulkan kepada Walikota dalam rangka menetapkan status/tingkat bencana skala di Kota Makassar. Selanjutnya, dengan memperhatikan usulan skala di Kota Makassar tersebut, Walikota Kota Makassar tersebut menimbang kemudian menetapkan status atau tingkatan skala bencana yang terjadi.

3.1.3 Dimensi Integrasi Pada Penyaluran Bantuan Logistik di Kota Makassar

a. Komunikasi dan Koordinasi

Pengelolaan bencana banjir tidak dapat dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar saja, akan tetapi dibutuhkan aktor-aktor lain yang ikut berpartisipasi untuk terlibat membantu penanggulangan bencana. Dalam pelaksanaan penyaluran bantuan logistik, diperlukan adanya unsur-unsur pendukung dari berbagai arah, tidak hanya dari unsur pemerintahan saja tetapi juga dapat melalui masyarakat lain secara langsung yang ikut serta membantu masyarakat lain yang terdampak bencana banjir. Berbagai langkah koordinasi oleh pemerintahan daerah dalam pengelolaan bantuan logistik antara lain sebagai berikut:

- 1) Penyaluran bantuan logistik lebih fokus kepada teknis bagaimana bantuan tersebut dapat didistribusikan kelokasi bencana banjir. Banyak *stakeholder* berkumpul di lokasi kejadian seperti BPBD, Pemdam Kebakaran, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan. Dalam menyalurkan peralatan dan anggotanya.
- 2) Bencana yang terjadi juga terintegrasi dengan pusat pengendalian bencana yang dilakukan oleh BPBD, disitu juga cuaca dan ketinggian air laut bisa dipantau untuk menghindari dan mengetahui hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.

BPBD Kota Makassar berkoordinasi dengan TNI, POLRI, SAR dalam mengumpulkan data korban, rumah rusak, dan titik pengungsian. Melaporkannya data dan kebutuhan bantuan ke Posko Kota dan Posko Induk.

3.2 Faktor-faktor yang Mendukung dan Menghambat dalam Penyaluran Bantuan Logistik Pada Bencana Banjir

3.2.1 Faktor yang Mendukung

Terdapat beberapa faktor yang mendukung yaitu :

- Adanya beberapa posko carester diwilayah kota makassar yang menjadi sarana bagi personil untuk segera dapat mendeteksi kejadian bencana
- Fungsi relawan Tim Reaksi Cepat (TRC) yang sigap dalam membantu penanganan bencana. Beberapa personil Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar menyiapkan peralatan dan logistik dalam menanggulangi bencana dan langsung ketempat kejadian yang terdampak bencana banjir.

- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar menjalin Supporting lintas skpd seperti Dinas Sosial, Pemadam Kebakaran, Komunikasi dan Informasi

3.2.2. Faktor yang Menghambat

Hambatan adalah halangan dan rintangan yang dihadapi dalam pelaksanaan atau penerapan sesuatu, dalam pelaksanaan suatu tertentu ada saja hambatan atau halangan yang dihadapi karena untuk tercapainya sebuah target tidak selalu berjalan dengan mulus. Pada dimensi ini peneliti mencari tahu hambatan apa saja yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penyaluran bantuan logistik kepada korban bencana banjir di Kota Makassar. Beberapa Faktor Penghambat dalam menyalurkan bantuan logistik kepada korban bencana banjir, yaitu :

1) Kurangnya sumber daya manusia (SDM)

Sumber daya manusia sangat menentukan keberhasilan dari suatu kegiatan yang dilakukan, sehingga dalam pelaksanaan penanggulangan bencana yang terjadi dibutuhkan banyak SDM yang memadai dan terlatih. Para anggota dari pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar memerlukan kualitas serta kuantitas Sumber Daya Manusia yang memadai dan mendukung penyelenggaraan penanggulangan kegiatan tanggap darurat khususnya dalam pendistribusian logistik. Kualitas yang dimiliki oleh SDM yang ada di BPBD Kota Makassar dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang ditempuh dan pelatihan yang telah dijalani. Hal tersebut dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan kegiatan penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku dan mendapatkan hasil yang maksimal dan optimal. Sumber Daya Manusia dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sendiri masih sedikit dan kurang dalam penanganan bencana banjir. Oleh karena itu, mereka belum bisa menjalankan tugas secara efektif dan efisien secara maksimal sesuai dengan tujuan yang diinginkan dan diharapkan

2) Keterbatasan sumber daya logistik dan peralatan

Dalam pelaksanaan manajemen bencana, salah satu kendala yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar adalah keterbatasan logistik seperti sarana transportasi armada roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) yang dimiliki yang menyebabkan penanggulangan bencana pada saat darurat bencana menjadi terhambat dan tidak maksimal dalam melaksanakan manajemen bencana yang baik

3) Keterbatasan anggaran

Kendala yang biasa terjadi pada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu kurangnya optimalnya dana yang dimiliki dan minimnya anggaran yang dikeluarkan. Dalam hal tersebut, Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPD) Kota Makassar yang juga memiliki dana yang terbatas dalam menanggulangi bencana banjir yang ada di Kota Makassar. Kemudian, kurangnya anggaran yang dikeluarkan untuk segala operasional dan penyediaan personil kedaruratan untuk membantu tugas di lapangan pada saat bencana banjir dapat menghambat jalannya penanganan darurat bencana bahkan dapat menyebabkan distribusi penyaluran logistik yang harusnya diberikan mempunyai jumlah yang tidak cukup atau kurang dari kebutuhan yang dilaporkan oleh korban bencana yang terdampak.

4) Jalur ke tempat bencana yang susah

Kondisi kemacetan lalu lintas di Kota Makassar yang padat yang menyulitkan penanganan bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam mendistribusikan bantuan logistik sangat susah untuk dilewati. Dikarenakan banyaknya jalur yang susah dilewati kendaraan darat, maka penyaluran bantuan logistik yang

dilaksanakan kadang tiba setelah bencana yang terjadi beberapa hari kemudian sehingga korban yang terdampak terlambat menerima bantuan

3.3 Upaya Dalam Mengatasi Hambatan Penyaluran Bantuan Logistik

Berdasarkan beberapa hambatan dalam penyaluran bantuan logistik, maka pemerintah menyiapkan beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk menanggulangi dan mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi saat penyaluran bantuan logistic wujud tanggung jawab atas tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup melakukan upaya, sebagai berikut :

3.3.1 Memberikan Sosialisasi Menambah Personil Sumber Daya Manusia di BPBD di Kota Makassar

Kuantitas sumber daya manusia yang ada di BPBD masih kurang memadai sehingga dibutuhkan penambahan personil baik dari pegawai maupun Tim Pelaksana Penanggulangan Bencana, dengan menambah personil, maka pelaksanaan penanggulangan bencana akan lebih efektif dan efisien serta cepat terlaksanakan. Meningkatkan sarana dan prasarana (fasilitas) yang ada baik.

3.3.2 Memaksimalkan Sumber Daya Logistik dan Peralatan

Salah satu kendala yang dihadapi BPBD kota Makassar yaitu keterbatasan Sumber daya Logistik dan Peralatam. Dalam hal ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar bekerja sama dengan peran Corporate Social Rspnibility (CSR) dan juga Satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD) dalam pengadaan untuk meningkatkan sarana baik prasarana (fasilitas) agar dalam pelaksanaan penyaluran bantuan logistik efektif dan efisien

3.3.3 Penambahan anggaran dalam hal Penanggulangan Bencana

Anggaran yang ditetapkan dalam penanggulangan bencana di Kota makassar bisa dibilang tergolong minim. Dengan adanya perubahan usulan anggaran untuk penanggulangan bencana khususnya untuk persediaan penyaluran bantuan logistik kepada korban bencana banjir, maka penyaluran bantuan kepada korban bencana tidak akan kurang lagi dan menyebabkan kebutuhan dari korban terdampak dapat terpenuhi dengan baik.

3.3.4 Kerjasama Dengan Aparat Pemerintah Setempat Dalam Penyaluran Bantuan

Salah satu yang menjadi kendala dari BPBD Kota Makassar dalam penyaluran bantuan logistik bencana adalah akses yang susah dilalui ke tempat bencana terjadi. Sehingga, BPBD Kota Makassar akan bekerjasama dengan TNI setempat dalam hal penyaluran bantuan logistik ke tempat bencana. Dengan bekerjasama dengan aparat setempat, maka penyaluran bantuan logistik ke tempat bencana yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penyaluran bantuan logistik oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada korban *bencana* banjir di Kota Makassar perlu dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku agar penyaluran bantuan logistik ke tempat bencana yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Penelitian menemukan temuan penting pada penelitian ini, yakni Badan Penanggulangan Bencana daerah di Kota Makasar masih memiliki banyak hambatan dimulai dari Sumber Daya Manusia (SDM), peralatan logistic hingga saluran bantuan yang disediakan oleh BPBD. Sama halnya dengan temuan Kusuma Wardani dkk, bahwa adanya hambatan dari berbagai aspek dalam penanggulangan bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Rizal Wahyudi dkk, 2018). Belum optimalnya penyaluran bantuan logistik yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah karena prasarana yang

belum terpenuhi, Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih terbatas. Keberadaan sumber daya aparatur yang bertindak sebagai tim pelaksana yang menyalurkan bantuan untuk korban bencana alam ditinjau dari segi kualitas maupun kuantitas termasuk cukup memadai. Mengingat Kota Makassar mengalami peningkatan banjir dari tahun ketahun. Hasil penelitian memperlihatkan bahwasanya BPBD telah mengupayakan dalam mengelola logistik dan peralatan, tetapi masih mendapati sejumlah permasalahan yang diakibatkan oleh sejumlah indikator dari manajemen logistik serta terbatasnya peralatan bencana. Indikator pergudangan di BPBD Kota Makassar kecil dan kurang ventilasi udara, dimana pada penyelenggaraannya hanya mengoptimalkan kendaraan yang tersedia. Perbedaan yang ditemui yakni penelitian ini membahas keefektivisan BPBD dalam mengupayakan manajemen logistik dan peralatan bencana yang memadai, sama halnya dengan temuan (Dina Kusuma Wardani, dkk 2022). Adanya penyaluran bantuan social ini diharap mampu mendukung keberlangsungan hidup dari korban, dimana meliputi, pakaian, makanan, serta lainnya. Perbedaan yang diperoleh yakni penelitian ini membahas Peranan dari Dinas Sosial untuk menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat korban kebakaran, serta dilaksanakannya di Kota Makassar, sama halnya (Muhammad Lukman, dkk, 2020)

IV. KESIMPULAN

Kebijakan Pemerintahan Kota Makassar mengenai bantuan logistik bencana alam sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 04 Tahun 2009 secara faktual dapat memberikan kontribusi yang berarti kepada korban yang terkena bencana alam, baik yang mengalami bencana banjir maupun bencana lainnya. Berdasarkan hasil penelitian tentang Penyaluran Bantuan Logistik oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar dalam memberikan bantuan kepada korban bencana banjir yang terdampak dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penyaluran bantuan logistik terhadap korban bencana banjir di Kota Makassar masih belum optimal.
2. Efektivitas penyaluran bantuan logistik secara implementatif kurang optimal, karena secara aplikatif masih dihadapkan pada beberapa permasalahan, salah satunya keterbatasan sumber daya manusia dan sarana penyaluran logistik, sehingga penyaluran bantuan mengalami keterlambatan.
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menyalurkan bantuan logistik masih mempunyai beberapa hambatan seperti keterbatasan anggaran yang dimiliki BPBD yang membuat penyaluran bantuan logistik kepada masyarakat sendiri menjadi terbatas, dan BPBD masih kurang optimal dalam berkoordinasi dengan Dinas terkait

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian, penelitian ini hanya mencakup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar, mengenai penyaluran bantuan logistic kepada masyarakat di Kota Makassar

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan penyaluran bantuan logistik oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada korban *bencana* banjir di Kota Makassar untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Moleong, L., J. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nazir, M. (2013). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Hakim, M. Lukmanul. (2021). “*Peran Dinas Sosial dalam Penyaluran Bantuan Sosial terhadap Korban Bencana Kebakaran di Kota Samarinda Tahun 2018*”. *Jurnal Administrasi Publik* Vol, 1. Samarinda: Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.

Wardani, D. Kusuma. (2022). *Efektivitas Manajemen Operasional Pimpinan dalam Pengelolaan Logistik dan Peralatan di Kantor BPD Sumatera Utara*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Mughron, Maulana Mufis dkk. 2016. *Efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Pelaksanaan Program Kelurahan Siaga Bencana di Kota Semarang*. *Journal Of Public Policy and Management*. Volume 5 Nomor 1 Tahun 2016

Rizal Wayudha (2018). “*Implementasi Penanggulangan Bencana Banjir Oleh BPBD Provinsi DKI Jakarta*” Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta.

